

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah perkotaan telah membawa suatu persoalan penting seperti derasnya arus mobilisasi penduduk dari desa ke kota maupun berkembangnya berbagai kawasan pemukiman, industri, dan perdagangan. Salah satu dampak dari kondisi tersebut adalah ancaman terhadap bahaya kebakaran (Hia, 2007). Akhir-akhir ini peristiwa kebakaran sering terjadi pada masyarakat. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk terutama di daerah kawasan industri dapat menimbulkan banyak kerugian, diantaranya kerugian akibat sosial, ekonomi dan psikologi. Kebakaran di kawasan industri dapat mengakibatkan terhentinya usaha dan kerugian investasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja. (Suprpto, 2007).

Kebakaran adalah suatu fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen (sebagai contoh) yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, uap air, karbon monoksida, atau produk dan efek lainnya (Badan Standar Nasional, 2000). Oleh karena itu, bencana kebakaran selalu melibatkan bahan mudah terbakar dalam jumlah yang besar baik yang berbentuk padat seperti kayu, kertas atau kain maupun bahan cair seperti bahan bakar dan bahan kimia (Ramli, 2010).

Sebuah data resmi dari *United States National Fire Protection Association (US NFPA)*, jumlah kasus kebakaran yang terjadi di 50 negara bagian Amerika Serikat pada tahun 2006 sebanyak 524.000 kasus, tahun 2007 sebanyak 530.500 kasus dan pada tahun 2008 jumlah kebakaran yang terjadi sebanyak 515.000 kasus (Ramli, 2010). Kasus kebakaran pemukiman di Indonesia tahun 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2015 terdapat 983 kasus kebakaran pemukiman dan 81 kasus kebakaran hutan dan lahan. Kejadian kebakaran di Indonesia sekitar 63% disebabkan hubungan pendek arus listrik di kawasan padat penduduk, 10% dari lampu minyak dan lilin, 5% dari rokok, 1% dari kompor, dan lainnya (BNPB, 2015). Kebakaran dapat terjadi di mana dan kapan saja, salah satunya di bangunan

gedung di suatu daerah padat penduduk. Berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, frekuensi kejadian kebakaran yang terjadi di Jakarta pada tahun 2009 sebanyak 843 kejadian, tahun 2010 sebanyak 708, tahun 2011 sebanyak 953 kejadian, tahun 2012 sebanyak 1.093 kejadian, tahun 2013 sebanyak 1.475 kejadian, tahun 2014 sebanyak 966 kejadian dan kejadian kebakaran tahun 2015 sampai tanggal 26 Juni 2015 berjumlah 515 kejadian kebakaran (Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, 2017). Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok kejadian kebakaran yang terjadi di Wilayah Kota Depok pada tahun 2011 sebanyak 138 kejadian, tahun 2012 sebanyak 158 kejadian, tahun 2013 sebanyak 142 kejadian, tahun 2014 sebanyak 195 kejadian dan kejadian kebakaran tahun 2015 sebanyak 226 kejadian dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 241 kejadian kebakaran (Damkar Kota Depok, 2017).

Kejadian kebakaran tersebut memiliki risiko besar yang dapat meningkatkan keterpaparan petugas pemadam kebakaran terhadap risiko pekerjaan yang dihadapinya. Berdasarkan penelitian terkait di Dinas Kebakaran Surabaya, pekerjaan pemadam kebakaran merupakan pekerjaan yang mengandung risiko kerja sangat tinggi berupa kecelakaan kerja yang berakibat fatal seperti cacat permanen bahkan kematian. Selain itu, saat menjalankan tugas di lapangan, pasukan pemadam kebakaran sering mengalami gangguan-gangguan kesehatan (Andriyan, 2011). Berdasarkan hasil peneliti yang lebih berisiko mengalami kecelakaan kerja yaitu juru padam. Hal ini sejalan dengan penelitian terkait yang berjudul *Gambaran Risiko Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran Di Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan* menyatakan bahwa keluhan kesehatan yang mereka rasakan umumnya dikarenakan banyak menghirup asap yang terdapat di lokasi kebakaran seperti batuk, sesak nafas, mual, muntah, pusing, dan mata perih (Shafwani, 2012).

Adapun lembaga yang berwenang untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi adalah institusi pemadam kebakaran. Kewenangan umum institusi pemadam kebakaran dalam memadamkan kebakaran tercantum dalam *The Fire Services Acts 1947* yang mempersyaratkan petugas pemadam kebakaran bekerja dengan efisien dan terorganisasi guna memastikan pasokan air yang mencukupi

untuk memadamkan kebakaran dan memberikan hak kepada petugas pemadam kebakaran untuk memasuki gedung-gedung jika dicurigai sedang mengalami kebakaran (Ridley, 2008).

Terkait dengan masalah bahaya kebakaran, Kantor Pemadam Kebakaran Kota Depok yang sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada langsung dibawah Departemen Pekerjaan Umum, maka sejak per tanggal 09 Februari tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Depok, terbentuklah Kantor Pemadam Kebakaran. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka instansi kantor pemadam kebakaran ini berubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Berdasarkan data yang diperoleh dari arsip – arsip Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok diketahui dengan karyawan PNS dan Non PNS. Petugas pemadam kebakaran dengan waktu kerja dibagi menjadi 2 regu yang dibagi dalam 2 *shift* dengan waktu kerja 24 jam per *shift* (Damkar Kota Depok, 2017)

Bidang pengaturan penanganan terhadap bahaya kebakaran oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan diterbitkannya berbagai Peraturan Menteri (PerMen) di mana salah satunya yang sangat terkait dengan penanganan kebakaran di perkotaan adalah Peraturan Menteri nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Pedoman Teknis RISPK bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bencana lainnya (Pemkot Depok, 2010)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tidak terlepas dari masalah-masalah yang terjadi pada saat operasi pemadaman, antara lain saat pemberangkatan menuju lokasi, petugas dihadapi dengan masalah kondisi jalanan yang macet sehingga dapat menghambat petugas pemadam kebakaran menuju lokasi kejadian. Hal ini tidak sesuai dengan waktu tanggap (*Response Time*) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Selain itu, masalah selama operasi pemadaman api dilokasi kebakaran adalah

banyaknya warga yang datang ke tempat lokasi kebakaran hanya ingin melihat kejadian kebakaran yang mempersulit petugas dalam menjalankan operasi pemadaman. Berdasarkan hasil peneliti dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok mendapat apresiasi *Response Times* terbaik se Indonesia yang terletak di jalan Boulevard Grand Depok City Depok. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai gambaran upaya penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok (Damkar Kota Depok, 2017)

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok mengenai kejadian kebakaran pada tahun 2011 sebanyak 138 kejadian, tahun 2012 sebanyak 158 kejadian, tahun 2013 sebanyak 142 kejadian, tahun 2014 sebanyak 195 kejadian dan kejadian kebakaran tahun 2015 sebanyak 226 kejadian dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 241 kejadian kebakaran (Damkar Kota Depok, 2017). Namun demikian, penelitian untuk melihat gambaran upaya penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok belum pernah teliti. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran upaya penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017.

I.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana prosedur kerja pada setiap tahapan kegiatan operasi penanggulangan kebakaran petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017?
- b. Bagaimana hambatan yang dihadapi petugas saat melakukan penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017?
- c. Apa sarana dan prasarana yang digunakan pada saat proses penanggulangan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017?

- d. Bagaimana pelatihan yang didapat petugas proses penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017?
- e. Bagaimana langkah pencegahan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017?

I.4 Tujuan Penelitian

I.4.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran upaya penanggulangan kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017.

I.4.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui prosedur kerja pada setiap tahapan kegiatan operasi penanggulangan kebakaran petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017.
- b. Mengetahui hambatan yang dihadapi petugas saat melakukan upaya penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017.
- c. Mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang digunakan pada saat upaya penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017.
- d. Mengetahui pelatihan yang didapat petugas upaya penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017.
- e. Mengetahui langkah pencegahan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Bagi Instansi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok)

- a. Sebagai gambaran mengenai upaya penanggulangan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok agar dapat melakukan upaya pencegahan kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat kerja.
- b. Memberi gambaran bagi manajemen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dalam membuat perencanaan peningkatan pelayanan kesehatan pada pekerja dan peningkatan sistem keselamatan kesehatan kerja untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang terjadi akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja.
- c. Dapat digunakan untuk masukan dan informasi tambahan dalam menentukan kebijakan baru serta pengambilan keputusan.

I.5.2 Bagi Petugas Pemadam Kebakaran

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tenaga kerja khususnya mengenai upaya penanggulangan pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.
- b. Sebagai upaya deteksi dini mengenai upaya penanggulangan kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok agar dapat melakukan upaya pencegahan kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat kerja.

I.5.3 Bagi Universitas

- a. Dapat menjalin atau meningkatkan kerjasama yang baik dengan lembaga terkait sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk mengadakan penelitian yang relevan berikutnya.
- b. Dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya penelitian dalam bidang penanggulangan kebakaran.

I.5.4 Bagi Mahasiswa

- a. Memahami upaya penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok sebagai salah satu aspek keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan tentang kebakaran yang telah didapat diperkuliahan pada penerapan di lapangan.
- c. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang ada atau teori yang telah didapatkan dengan kenyataan penerapan di lapangan.
- d. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.

I.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tentang gambaran upaya penanggulangan kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017 merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat analitis deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran upaya penanggulangan kebakaran. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei - Juni 2017 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu 1 orang staf pencegahan dan penyuluhan, 5 juru padam, 1 operator mobil.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan seperti tidak dilakukannya *checklist* kelengkapan personil pemadam, penyediaan sarana dan prasarana, dan permasalahan lainnya, sehingga peneliti ingin melakukan investigasi lebih dalam lagi. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada petugas pemadam kebakaran. Data sekunder berupa dokumen instansi terkait dan studi literatur mengenai standar atau peraturan yang sesuai dengan kebakaran. Data yang sudah dikumpulkan lalu dicacukan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009.